

dalam pengembangan sistem digital dan solusi inovatif. - Masyarakat yang terbuka terhadap inovasi dan penggunaan teknologi. - Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Desa	difokuskan pada pembangunan fisik. - Biaya pengadaan teknologi dan pemeliharannya cukup tinggi. - Perangkat desa yang belum memiliki visi digital. - Minimnya inisiatif dari pemimpin lokal untuk mengembangkan program smart village. - Resistensi dari masyarakat terhadap perubahan atau ketakutan terhadap teknologi. - Adanya kesenjangan antara generasi muda dan tua dalam menerima inovasi. - Belum ada pedoman yang baku untuk implementasi teknologi di desa.	<i>volunteer</i> dari mahasiswa, komunitas IT, atau CSR perusahaan teknologi. - Pembuatan modul pelatihan sederhana dan praktis, menggunakan bahasa lokal. - Alokasi anggaran Dana Desa untuk komponen digitalisasi secara bertahap. - Pengajuan bantuan dan kerja sama dengan lembaga donor, NGO, CSR perusahaan, atau startup teknologi. - Optimalisasi teknologi open-source dan solusi murah namun efektif (misalnya, penggunaan Google Workspace, sistem informasi desa berbasis web gratis seperti SID Kemendesa). - Sosialisasi manfaat jangka panjang dari digitalisasi desa kepada kepala desa dan perangkatnya. - Studi banding ke desa-desa yang sudah berhasil menerapkan smart village.	Gubernur - Membentuk Tim Ahli dari Perguruan Tinggi IBI Darmajaya - Membentuk Tim Official di Kabupaten
--	---	--	---

		- Dorongan dari pemerintah kabupaten atau provinsi agar kepala desa memiliki target digitalisasi dalam RPJMDes.	
--	--	---	--

Sumber: *Olahan Data DPMDT, Agustus 2025*

Dalam mencapai sasaran Meningkatkan Desa menggunakan sistem Smart Village PMDT berinovasi :

a. E-Voting

Aplikasi e-Voting merupakan salah satu aplikasi dari program Smart Village yang digunakan untuk pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa secara digital dengan memanfaatkan KTP elektronik, pada Mei 2024 serentak di Kabupaten Pringsewu pada 18 Pekon, 8 Kecamatan di 98 TPS dengan mata pilih 48.000. Kemudian pada Agustus 2022 e-Voting dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah pada 5 Kampung di 15 TPS.

Tim Smart Village telah membuat aplikasi terkait dengan pemilihan kepala desa secara digital (e-voting) yang telah disimulasikan di Pekon Podomoro Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu pada 9 Pebruari 2021 Simulasi tersebut juga dihadiri serta disaksikan langsung oleh Bupati Pringsewu bersama Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Kepala Dinas PMDT Provinsi dan Kepala Balai Pemerintahan Desa Ditjen Pemerintahan Desa Kemendagri.



b. E-Samdes (Elektronik Samsat Desa)

Salah satu terobosan BUMDES adalah program e-samdes (Elektronik Samsat Desa) dengan menunjuk BUMDES sebagai agen pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga masyarakat cukup datang ke BUMDES terdekat. e-samdes ini telah diterapkan oleh 277 desa di Provinsi Lampung dan diharapkan mampu menunjang peningkatan PAD.



c. Desa Anti Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengukuhkan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, sebagai Desa Antikorupsi atas keberhasilannya meraih predikat istimewa dengan memperoleh nilai 92,75 pada program Desa Antikorupsi. Terpilihnya Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, sebagai Desa Antikorupsi KPK RI ini dari hasil penilaian yang telah dilakukan pada 10 desa se- Indonesia sebelumnya sebagai perwakilan Desa antikorupsi Sumbagsel. Adapun tujuan Program Desa Antikorupsi yaitu menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada Pemerintah dan Masyarakat desa serta memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta Masyarakat desa dalam Upaya mencegah dan memberantas korupsi.



2. Sasaran “Menurunkan Status Desa Tertinggal dan Meningkatkan Status Desa Mandiri” dengan indikator “Persentase Penurunan Jumlah Desa Tertinggal dan Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri” yang hendak dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan tahun 2019-2024.

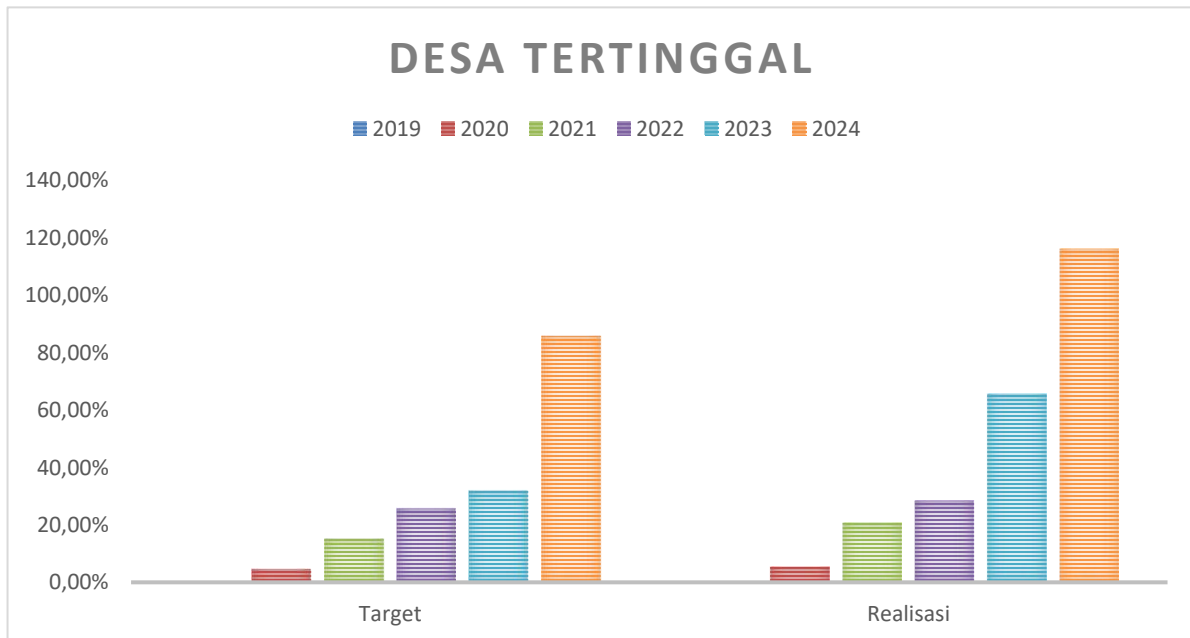
Tabel 3.7
Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Utama 2019-2024

Sasaran	Menurunkan Status Desa Tertinggal dan Meningkatkan Status Desa Mandiri																																
IKU (2)	Persentase Penurunan jumlah desa tertinggal																																
Satuan	Persentase																																
Formulasi	Jumlah Desa Tertinggal / Jumlah Seluruh Desa x 100%																																
Capaian Desa Tertinggal Tahun 2019-2024																																	
No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik Capaian Desa Tertinggal 2019-2024																												
1.	2019	20,06%	21,06%	104,98%	Desa Tertinggal <table><thead><tr><th>Tahun</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Capaian</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>20,06%</td><td>21,06%</td><td>104,98%</td></tr><tr><td>2020</td><td>8,42%</td><td>9,52%</td><td>113,06%</td></tr><tr><td>2021</td><td>4,27%</td><td>5,25%</td><td>122,95%</td></tr><tr><td>2022</td><td>1,27%</td><td>1,56%</td><td>122,83%</td></tr><tr><td>2023</td><td>0,15%</td><td>0,16%</td><td>106,67%</td></tr><tr><td>2024</td><td>0,15%</td><td>0,16%</td><td>106,67%</td></tr></tbody></table>	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	2019	20,06%	21,06%	104,98%	2020	8,42%	9,52%	113,06%	2021	4,27%	5,25%	122,95%	2022	1,27%	1,56%	122,83%	2023	0,15%	0,16%	106,67%	2024	0,15%	0,16%	106,67%
Tahun	Target	Realisasi	Capaian																														
2019	20,06%	21,06%	104,98%																														
2020	8,42%	9,52%	113,06%																														
2021	4,27%	5,25%	122,95%																														
2022	1,27%	1,56%	122,83%																														
2023	0,15%	0,16%	106,67%																														
2024	0,15%	0,16%	106,67%																														
2.	2020	8,42%	9,52%	113,06%																													
3.	2021	4,27%	5,25%	122,95%																													
4.	2022	1,27%	1,56%	122,83%																													
5.	2023	0,15%	0,16%	106,67%																													
6.	2024	0,15%	0,16%	106,67%																													

Sumber: *Olahan Data DPMDT, Maret 2025*

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU 2) “Persentase Penurunan Jumlah Desa tertinggal” diperoleh realisasi sebesar 0,16% dari target sebesar 0,15% yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) Tahun 2024. Berdasarkan target tersebut diperoleh capaian sebesar 106,67% dan bisa dikategorikan **Sangat Memuaskan**.

Grafik 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi “Persentase Penurunan Jumlah Desa Tertinggal” DPMDT Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



Sumber: Olahan Data DPMDT, Februari 2025

Sedangkan target dan realisasi akhir periode Renstra tahun 2024 jika dibandingkan dengan target daerah atau provinsi lain, dalam hal ini dibandingkan dengan provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut.

Dalam mencapai sasaran Menurunkan Status Desa Tertinggal dan Meningkatkan Status Desa Mandiri Dinas PMDT dengan Inovasi Sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pencapaian Sasaran Dua Tahun 2024 Terhadap Target Provinsi Lain

Pencapaian Sasaran		
Sasaran	Menurunkan Status Desa Tertinggal dan Meningkatkan Status Desa Mandiri	
IKU (1)	Persentase Penurunan Jumlah Desa Tertinggal	
Satuan	Persentase	
2024		Provinsi Sumatera Selatan
Target	Realisasi	1,01%
0,15%	0,16% (DPMDT)	

Sumber: Olahan Data DPMDT, Februari 2025

Jika dibandingkan dengan target nasional yaitu sebagai pembanding dengan realisasi Persentase Penurunan Jumlah Desa Tertinggal daerah lain yang diambil sebagai perbandingan adalah Provinsi Sumatera Selatan, pada Tahun 2024 diperoleh realisasi Peningkatan Jumlah Desa Tertinggal Sumatera Selatan sebesar 1,01%. Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah desa tertinggal sebanyak 29 dari jumlah desa sebanyak 2.855 dan Provinsi Lampung memiliki jumlah desa tertinggal sebanyak 4 dari jumlah desa 2.446.

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan status desa tertinggal:

1. Melaksanakan evaluasi terhadap desa tertinggal di Provinsi Lampung yang nilai IDM (indeks desa membangun) dengan intervensi program dari APBD Provinsi Lampung dan APBD Kabupaten untuk menambah nilai yang menjadi penyebab desa tertinggal.
2. Mengarahkan desa-desa untuk menyusun APBDes dengan mengutamakan indikator yang masih rendah untuk meningkatkan nilai sehingga meningkat menjadi desa kategori di atasnya.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat berupa, 'pengadaan dan distribusi telur' bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bergizi bagi masyarakat atau pihak yang membutuhkan. Telur dipilih karena merupakan sumber protein yang mudah diakses, bergizi, dan terjangkau. Kegiatan ini penting dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan gizi, atau program tertentu seperti bantuan sosial, pemberian makanan tambahan, atau program subsidi pangan. Pengadaan telur ayam sebanyak 24.813,5 KG dengan target bantuan Bayi di Bawah Dua Tahun (baduta) sebanyak 4.932 bayi.



Pengadaan Alata Antropometri Kit sebanyak 37 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.9
Daftar Penerima Bantuan Alat Antropometri Kit

NO	KABUPATEN	PUSKESMAS	KELUARAHAH / DESA	POSYANDU	JUMLAH ANTROPOME TRI YG BELUM TERSEDIA
1	AMPUNG UTAR	NEGARA RATU	NEGARA RATU	POSYANDU MAWAR 2	1
			OGAN JAYA	POSYANDU FLAMBOYAN	1
				POSYANDU BUGENVILE	1
			KOTA NEGARA	POSYANDU RAHAYU	1
			GEDUNG BATIN	POSYANDU PUTRI KUSUMA	1
			BARU RAHARJA	POSYANDU CEMARA	1
			PADANG RATU	POSYANDU KENANGA	1
2	AMPUNG UTAR	KETAPANG	BUMI RATU	POSYANDU ASPARAGUS	2
				POSYANDU PAKI	
			KETAPANG	POSYANDU NUSA INDAH	1
			SINAR GALIH	POSYANDU KUTILANG	1
			LABUHAN RATU PASAR	POSYANDU BIMA SAKTI	1
			KARANG REJO	POSYANDU MANYAR 1	1
			KOTA AGUNG	POSYANDU MAWAR 1	1
3	AMPUNG UTAR	WONOGIRI	TANJUNG SENANG	POSYANDU MELATI	1
			CURUP GURUH	POSYANDU MELATI 2	1
4	AMPUNG UTAR	TANJUNG RAJA	SINAR MULYA	POSYANDU MENTARI	1
			TANJUNG RIANG	POSYANDU MELATI	1
			TULUNG BALAK	POSYANDU CEMPAKA	1
5	AMPUNG UTAR	ULAK RENGAS	SUKA MARGA	POSYANDU LADA 5	1
				POSYANDU LADA 2	1
				POSYANDU LADA 4	1
6	AMPUNG UTAR	TULANG BAWANG BA	NEGARA TULANG BAWAN	POSYANDU MAYANG INDA	1
7	AMPUNG UTAR	KEMALO ABUNG	GILIH SUKA NEGERI	POSYANDU BANYUMAS	1
8	AMPUNG UTAR	BUKIT KEMUNING	BUKIT KEMUNING	POSYANDU LINGKUNGAN 1	1
9	AMPUNG UTAR	CEMPAKA	CEMPAKA	POSYANDU CEMPAKA PUT	1
			CEMPAKA BARAT	POSYANDU SEROJA	1
			CEMPAKA TIMUR	POSYANDU SEDAP MALAM	1
			SRIJAYA	POSYANDU SAKURA	1
			CAHAYA MAKMUR	POSYANDU MATAHARI	1
10	AMPUNG UTAR	TATAKARYA	TATAKARYA	POSYANDU KARTINI	1
				POSYANDU DULANG MAS	1
				POSYANDU SRIKANDI	1
				POSYANDU SRIKANDI HUSA	1
				POSYANDU KASIH IBU	1
			BANDAR ABUNG	POSYANDU DELIMA	1
			BANDAR ABUNG	MAWAR	1
TOTAL KEKURANGAN ANTROPOMETRI					37

Sumber: Diolah Dinas PMDT, Maret 2025

Tabel 3.10
Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Solusi pada IKU “Persentase Penurunan Jumlah Desa Tertinggal”

FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	SOLUSI	PROGRAM PENDUKUNG YANG TELAH DILAKSANAKAN
- Sumber Daya Alam (SDA) yang Melimpah Misalnya: pertanian, perkebunan, perikanan, tambang, dll. - Gotong Royong & Solidaritas Sosial Warga Kerja sama masyarakat yang kuat memudahkan pelaksanaan program pembangunan . - Kearifan Lokal & Budaya yang Kuat Bisa dijadikan daya tarik wisata dan identitas desa. - Dukungan Pemerintah & Lembaga Swadaya Adanya program seperti Dana Desa, pelatihan,	- Aksesibilitas Rendah Jalan rusak, jauh dari pusat kota, sulit dijangkau. - Minimnya Infrastruktur Dasar Seperti listrik, air bersih, sinyal, layanan kesehatan, dan pendidikan. - Tingkat Pendidikan & SDM yang Rendah Kurangnya pelatihan atau keterampilan membuat masyarakat sulit berkembang. - Keterbatasan Ekonomi & Modal Kurangnya lapangan kerja dan akses permodalan usaha. - Ketergantungan terhadap Bantuan Pemerintah Minim inisiatif dan inovasi dari masyarakat sendiri. - Kurangnya Perencanaan & Kepemimpinan Desa Lemahnya tata kelola pemerintahan desa.	- Peningkatan Infrastruktur. Bangun jalan, jembatan, listrik, internet, dan air bersih. Perbaiki akses menuju desa agar lebih mudah dijangkau. - Peningkatan Sumber Daya Manusia. Pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan. Pendidikan non-formal seperti kursus dan pelatihan pertanian modern. - Penguatan Ekonomi Lokal. Kembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Dorong pengolahan hasil pertanian/perikana n secara mandiri. Bantu pemasaran produk desa secara digital. - Pemanfaatan Teknologi Digital. Akses internet untuk promosi	- Desa Baznas, memiliki tujuan pengentasan masyarakat miskin di desa. - Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/ Kota tentang Pengentasan Desa Tertinggal - Melaksanakan Evaluasi terhadap Proses Penyusunan APBDes - Mengawal Proses Input Data IDM - Memfokuskan Penggunaan Dana Desa

bantuan sosial, dll. - Generasi Muda yang Produktif Anak muda yang kreatif bisa menjadi penggerak perubahan di desa. - Akses Teknologi dan Informasi Internet dan teknologi bisa digunakan untuk pemasaran produk desa, pendidikan, dll.		wisata desa atau jualan online. Pendidikan daring dan pelatihan digital untuk warga. - Pemberdayaan Masyarakat. Libatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Beri ruang bagi anak muda untuk berkontribusi. - Kolaborasi dengan Pihak Luar. Jalin kerja sama dengan perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta.	
--	--	--	--

Sumber: *Olahan Data DPMDT, Agustus 2025*

- Desa Baznas

Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meluncurkan Program Desa BAZNAS Sektor Peternakan. Desa Madukoro Kabupaten Lampung Utara dan Kampung Menggala Kecamatan Tulang Bawang menjadi Percontohan, Desa Baznas sektor Peternakan, dimana tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, selain memberikan bantuan Ternak Kambing, juga disediakan kandang agar kelompok yang mendapatkan bantuan bisa secara maksimal memanfaatkan bantuan tersebut.



Tabel 3.9
Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Utama 2019-2024

Sasaran	Menurunkan Status Desa Tertinggal dan Meningkatkan Status Desa Mandiri																		
IKU (3)	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri																		
Satuan	Persentase																		
Formulasi	Jumlah Desa Mandiri / Jumlah Desa Maju x 100%																		
Capaian Desa Mandiri Tahun 2019-2024																			
No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Grafik Capaian Desa Mandiri 2019-2024														
7.	2019	2,46%	2,58%	104,87%	Realisasi <table><thead><tr><th>Tahun</th><th>Realisasi</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>2,58%</td></tr><tr><td>2020</td><td>5,67%</td></tr><tr><td>2021</td><td>11,07%</td></tr><tr><td>2022</td><td>13,07%</td></tr><tr><td>2023</td><td>17,97%</td></tr><tr><td>2024</td><td>30,90%</td></tr></tbody></table>	Tahun	Realisasi	2019	2,58%	2020	5,67%	2021	11,07%	2022	13,07%	2023	17,97%	2024	30,90%
Tahun	Realisasi																		
2019	2,58%																		
2020	5,67%																		
2021	11,07%																		
2022	13,07%																		
2023	17,97%																		
2024	30,90%																		
8.	2020	4,36%	5,67%	130,04%															
9.	2021	10,37%	11,07%	106,67%															
10.	2022	11,59%	13,07%	112,76%															
11.	2023	15,69%	17,97%	114,53%															
12.	2024	25,58%	30,90%	120,79%															

Sumber: *Olahan Data DPMDT, Februari 2025*

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU 3) “Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri” diperoleh realisasi sebesar 30,90% dari target sebesar 25,58% yang direncanakan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) Tahun 2024. Berdasarkan target tersebut diperoleh capaian sebesar 120,79% dan bisa dikategorikan **Sangat Memuaskan**. Dari tabel diatas dapat dilihat dan dibandingkan target, realisasi dan capaian dari tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, hal ini terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 6,26%. Capaian

realisasi dari awal periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, terjadi kenaikan lalu terjadi penurunan sedikit yang terjadi pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 23,37%. Pada akhir periode Renstra tahun 2024 diperoleh capaian sebesar 120,79%.

Grafik 3.4

Perbandingan Antara Target dan Realisasi “Persentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri” DPMDT Provinsi Lampung Tahun 2019-2024



Sumber: Sumber: *Olahan Data DPMDT, Februari 2025*

Sedangkan target dan realisasi akhir periode Renstra tahun 2024 jika dibandingkan dengan target daerah atau provinsi lain, dalam hal ini dibandingkan dengan provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut.

Tabel 3.11**Pencapaian Sasaran Dua Tahun 2024 Terhadap Target Provinsi Lain**

Pencapaian Sasaran		
Sasaran	Menurunkan Status Desa Tertinggal dan Meningkatkan Status Desa Mandiri	
IKU (1)	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	
Satuan	Desa	
2024		Provinsi Sumatera Selatan
Target	Realisasi	6,40%
25,58%	30,90% (DPMDT)	

Sumber: *Diolah Dinas PMDT, Februari 2025*

Jika dibandingkan dengan target nasional yaitu sebagai pembandingan dengan realisasi Persentase Peningkatan Desa Mandiri daerah lain yang diambil sebagai perbandingan adalah Provinsi Sumatera Selatan, pada Tahun 2024 diperoleh realisasi Peningkatan Jumlah Desa Mandiri Sumatera Selatan sebesar 6,40%. Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah desa mandiri sebanyak 183 dari jumlah desa sebanyak 2.855 dan Provinsi Lampung memiliki jumlah desa mandiri sebanyak 361 dari jumlah desa 2.446.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Di jelaskan bahwa status desa ditetapkan dengan menggunakan Indeks Desa Membangun adalah menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari :

2. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);
 - a. modal sosial;
 - b. kesehatan;

- c. pendidikan; dan
 - d. permukiman.
3. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan
- Dimensi Ekonomi
4. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).
- Dimensi Ekologi

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status desa mandiri:

1. Melaksanakan evaluasi terhadap desa maju yang ada di Provinsi Lampung yang nilai IDM (indeks desa membangun) sudah mendekati nilai IDM desa mandiri dengan fokus anggaran yang dapat ditingkatkan.
2. Mengarahkan desa-desa untuk menyusun APBDes dengan mengutamakan indikator untuk meningkatkan nilai sehingga, menjadi desa mandiri.

Tabel 3.12
Indeks Desa Membangun (IDM)

STATUS IDM	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
MANDIRI	6	0,25	21	0,86	60	2,46	105	4,31	181	7,40	361	14,76
MAJU	232	9,53	370	15,20	542	22,26	803	32,98	1008	41,21	1168	47,75
BERKEMBANG	1674	68,75	1812	74,41	1705	70,02	1489	61,15	1253	51,23	913	37,33
TERTINGGAL	504	20,70	226	9,28	128	5,26	38	1,56	4	0,16	4	0,16
SANGAT TERTINGGAL	19	0,78	6	0,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
Jumlah Desa	2435		2435		2435		2435		2446		2446	

Sumber: Kemendes PDTT, Tahun 2024

3.4.2 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, Solusi dan Program/Kegiatan Pada IKU 2 “Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri”

Dalam mencapai sasaran dan tujuan pada IKU (Indikator Kinerja Utama) DPMDT Provinsi Lampung, yaitu pada IKU yang ke dua tentang peningkatan status desa mandiri terdapat beberapa Faktor Penghambat, Faktor Pendukung serta bagaimana Solusi yang harus dijalankan kedepannya agar semua capaian IKU yang juga mendukung capaian pembangunan daerah Provinsi Lampung ini diharapkan dapat lebih baik lagi. Rincian lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Solusi pada IKU “Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri”

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program Kegiatan Pendukung Yang Telah Dilaksanakan
- Tingkat pendidikan penduduk yang tinggi. - Akses yang baik ke layanan kesehatan dan pendidikan. - Ketersediaan tenaga kerja produktif. - Jalan yang layak dan terhubung antar wilayah. - Akses listrik dan air bersih. - Jaringan telekomunikasi dan internet yang memadai. - Fasilitas umum (pasar,	- Tingkat pendidikan dan literasi yang rendah. - Minimnya pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat. - Tingkat kesehatan dan gizi buruk. - Jalan rusak/parah dan minimnya transportasi. - Tidak ada akses ke listrik atau air bersih. - Tidak tersedianya layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. - Ketergantungan pada satu sektor (biasanya pertanian	- Tingkatkan kualitas data desa (profil desa, pemetaan kebutuhan). - Dorong pelatihan vokasional dan pendidikan non-formal. - Perkuat kolaborasi antar lembaga (desa, kabupaten, dan swasta). - Kembangkan potensi lokal berbasis kearifan lokal (pariwisata, produk lokal). - Manfaatkan dana desa secara efektif dan tepat	- Teknologi Tepat Guna (TTG), bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengelola potensi desa. - Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/ Kota tentang Peningkatan Status Desa - Melaksanakan Evaluasi terhadap

puskesmas, sekolah). - Akses ke pasar bagi hasil pertanian/perikanan/kerajinan. - Diversifikasi mata pencaharian. - Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif dan berkembang. - Pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan partisipatif. - Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. - Adanya lembaga desa yang aktif (PKK, Karang Taruna, dll). - Lokasi desa yang strategis atau mudah dijangkau. - Ketersediaan transportasi umum.	subsisten). - Tidak adanya lapangan kerja yang cukup. - Kurangnya modal dan akses perbankan. - Lembaga desa yang pasif atau tidak berjalan efektif. - Tidak adanya perencanaan pembangunan partisipatif. - Konflik internal atau lemahnya kepemimpinan desa. - Lokasi terpencil, terisolasi, atau rawan bencana. - Tidak adanya konektivitas dengan pusat pertumbuhan ekonomi.	sasaran. - Prioritaskan kebutuhan yang paling mendasar dan berdampak luas. - Kolaborasi Multi Pihak: Libatkan dinas terkait, LSM, dunia usaha, dan perguruan tinggi. - Digitalisasi Desa: Gunakan teknologi untuk mempercepat pelayanan, pemasaran, dan pendidikan. - Monitoring dan Evaluasi Berkala: Lakukan pemantauan capaian IDM secara berkala dan sesuaikan program.	Proses Penyusunan APBDes - Mengawal Proses Input Data IDM - Memfokuskan Penggunaan Dana Desa - Melaksanakan Evaluasi terhadap Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes)
---	---	---	--

Sumber: *Olahan DPMDT, Januari 2025*

1. Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 18 Juli 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Sesuai Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/353/V.12/HK/2024, Provinsi Lampung menetapkan pemenang Tk. Provinsi Lampung pada 3 Kategori yang akan mewakili Provinsi Lampung pada Tingkat Nasional diantaranya :

- i. INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA :

“Teknologi Ekstrusi Pemanfaatan Limbah Plastik”. Selviana Larasati - Kabupaten. Pringsewu

- ii. TTG UNGGULAN :

“Mesin Coper Cocopeat Multifungsi”. Sani Wahyudi dan Rio Gunawan Kabupaten Tulang Bawang Barat

- iii. POSYANTEK DESA BERPRESTASI :

Posyantek Pusat Sinergi Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat



3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi TA. 2024

Selama tahun 2024 pelaksanaan program/kegiatan yang dijalankan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas PMDT Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total Nilai Pagu Perubahan adalah sebesar **Rp.18.702.250.593,05,-** dengan realisasi anggaran

sebesar **Rp. 18.154.335.715,00,-** atau capaiannya yaitu **97,00%** dan dapat dikategorikan **efektif** dalam penggunaan anggaran tahun 2024.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran serta tingkat efektivitas pada setiap IKU Dinas PMDT Provinsi Lampung pada Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Pagu, Realisasi dan Capaian Anggaran Tahun 2024

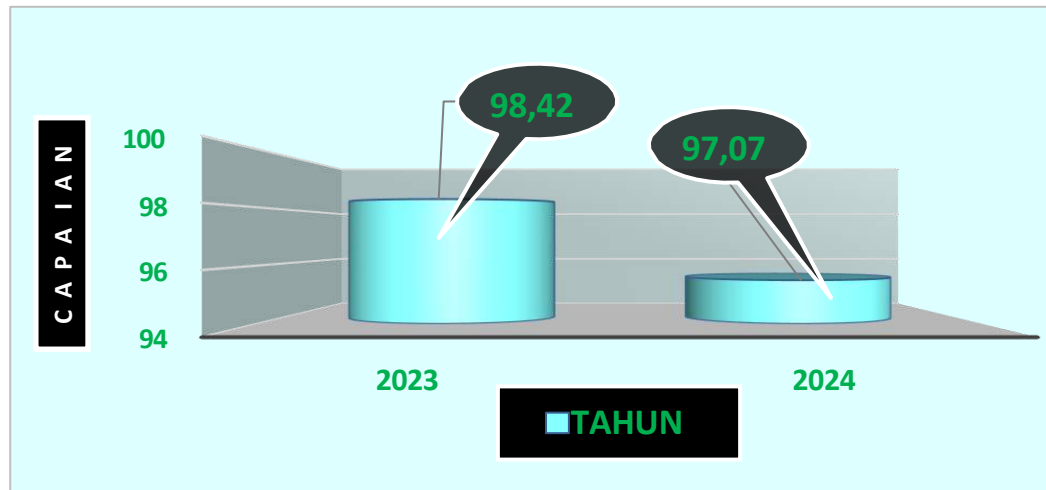
No	IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	PAGU P-APBD (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Persentase peningkatan jumlah desa menggunakan sistem smart village	13.991.331.963,00	13.464.691.511,00	96,24%
2.	Persentase Penurunan jumlah desa tertinggal	1.544.423.330,00	1.542.113.800,00	99,85%
3.	Persentase Peningkatan status desa mandiri	3.166.495.300,00	3.147.530.404,00	99,40%
TOTAL		18.702.250.593,00	18.154.335.715,00	97,07%

Sumber Data : Laporan Keuangan DPMDT Provinsi Lampung Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, IKU persentase peningkatan jumlah desa menggunakan sistem smart village dengan pagu perubahan sebesar Rp.13.991.331.963,00 dan realisasi sebesar Rp.13.464.691.511,00 diperoleh capaian sebesar 96,24%. Persentase Penurunan jumlah desa tertinggal dengan pagu perubahan sebesar Rp.1.544.423.330,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.542.113.800,00 dengan capaian sebesar 99,85%. Persentase peningkatan status desa mandiri dengan pagu perubahan sebesar Rp.3.166.495.300,00 dan realisasi sebesar Rp.3.147.530.404,00 dengan capaian sebesar 99,40%. Sehingga, total pagu perubahan sebesar Rp.18.702.250.593,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.154.335.715,00 maka capaian yang diperoleh sebesar 97,07%.

Maka bisa dilihat perbandingannya dengan tahun 2024 ini capaiannya sebesar 97,07% sehingga mengalami penurunan dari tahun lalu sebesar 1,35% Berikut adalah grafik perbandingannya :

Grafik 3.5
Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran
Antara Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya (Tahun 2023)



Sedangkan Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2024 secara lebih rinci per sub kegiatannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Rincian Anggaran Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2024 (PER IKU, PER PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)

No.	IKU	Satuan	Anggaran 2024		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		P-APBD 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Persentase peningkatan jumlah desa menggunakan sistem smart village	%	13.991.331.963,00	13.464.691.511,00	96,24
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persen	12.427.808.863	11.995.695.411	96,52
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	persen	150.000.000	149.808.200	99,87

	Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	dokumen	45.000.000	44.979.900	99,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	50.000.000	49.863.200	99,73
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	55.000.000	54.965.100	99,94
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.475.455.314	8.110.122.410	95,69
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	8.424.955.314,00	8.059.633.710	95,66
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	0	0	0,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dokumen	25.000.000	24.997.400	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 dokumen	25.500.000	25.491.300	99,97
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 laporan	70.000.000	69.985.400	99,98
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	25.959.000	25.957.200	99,99
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	44.041.000	44.028.200	99,97
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 orang	530.000.000	515.895.300	97,34
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14 orang	180.000.000	167.310.000	92,95
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	350.000.000	348.585.300	99,60
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22 paket	2.067.169.200	2.045.538.116	98,95

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22 paket	44.495.600	44.434.600	99,86
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42 paket	250.000.000	229.090.000	91,64
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50 paket	30.000.000	30.000.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20 paket	25.000.000	25.000.000	100,00
	Penyediaan Bahan / Material	36 laporan	34.908.200	34.907.600	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 laporan	100.000.000	99.382.300	99,38
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 dokumen	1.226.890.400	1.226.850.816	100,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5 aplikasi	355.875.000	355.872.800	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	680.684.349	654.361.485	96,13
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 persen	126.484.349	104.741.485	82,81
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	554.200.000	549.620.000	99,17
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 unit	454.500.000	449.984.500	99,01
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35 unit	250.000.000	245.574.500	98,23
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46 unit	24.500.000	24.410.000	99,63
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	180.000.000	180.000.000	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN		1.000.000.000	1.000.000.000	100,00

	KERJASAMA DESA				
	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	3 Desa	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Desa	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		1.563.523.100	1.468.996.100	93,95
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 dokumen	1.563.523.100	1.468.996.100	93,95
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 dokumen	0	0	0,00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	329.000.000	316.050.000	96,06
	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan	1 dokumen	474.243.100	473.443.100	99,83
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar	1 dokumen	319.640.000	240.284.000	75,17
	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten / Kota	1 dokumen	440.640.000	439.219.000	99,68
No.	IKU	Satuan	Anggaran 2024		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		P-APBD 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Persentase Peningkatan status desa mandiri	%	3.166.495.300	3.147.530.404	99,40
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT		1.860.845.300	1.857.708.404	99,84

	HUKUM ADAT				
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas		1.860.845.300	1.857.708.404	99,84
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	0	0	0	0,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	3 dokumen	289.975.500	289.413.000	99,81
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	2 laporan	0	0	0
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15 laporan	309.821.000	309.591.000	99,93
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	61.048.800	61.032.600	99,97
	Fasilitasi tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	4 Pokja	1.200.000.000	1.197.671.804	99,81
	PROGRAM PERENCANAAN		100.000.000	94.712.000	94,71

	KAWASAN TRANSMIGRASI				
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	100.000.000	94.712.000	94,71
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	2 Kawasan Transmigrasi	100.000.000	94.712.000	94,71
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	%	80.650.000	70.514.000	87,43
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota	KK	80.650.000	70.514.000	87,43
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu)	KK	80.650.000	70.514.000	87,43
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	%	125.000.000	124.596.000	99,68
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	35 Satuan Permukiman	125.000.000	124.596.000	99,68
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	KK	125.000.000	124.596.000	99,68
No.	IKU	Satuan	Anggaran 2024		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		P-APBD 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Persentase Penurunan jumlah desa tertinggal	%	1.544.423.330	1.542.113.800	99,85
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT	%	1.544.423.330	1.542.113.800	99,85

	HUKUM ADAT				
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas		1.544.423.330	1.542.113.800	99,85
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	2 laporan	1.544.423.330	1.542.113.800	99,85
TOTAL			18.702.250.593,00	18.154.335.715,00	97,07

Sumber: *Olahan Data DPMDT, Maret 2025*

Dalam mencapai sasaran ‘meningkatkan desa menggunakan sistem smart village’ dengan indikator ‘persentase peningkatan jumlah desa menggunakan sistem smart village’ di dukung anggaran P-APBD seniai Rp.13.991.331.963,00 dengan realisasi Rp.13.464.691.511,00 (96,24%), di dukung dengan Program dan Kegiatan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda.
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan kegiatan, Fasilitasi Kerja Sama Antardesa yang menjadi Kewenangan Provinsi.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan kegiatan, Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam mencapai sasaran 'menurunkan status desa tertinggal dan meningkatkan status desa mandiri' dengan indikator:

- a. persentase penurunan jumlah desa tertinggal di dukung anggaran P-APBD seniai Rp. 1.544.423.330,00 dengan realisasi Rp. 1.542.113.800,00 (99,85%), di dukung dengan Program dan Kegiatan:
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dengan kegiatan, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Persentase peningkatan status desa mandiri di dukung anggaran P-APBD seniai Rp. 3.166.495.300,00 dengan realisasi Rp. 3.147.530.404,00 (99,40%), di dukung dengan Program dan Kegiatan:
 1. Program Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan, Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.
 3. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan, Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
 4. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan, Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan.

3.5 Efektivitas dan Efisiensi Program/Kegiatan

Efektifitas dan Efisiensi dari Program/Kegiatan dalam penggunaan anggaran terhadap capaian Misi DPMDT Provinsi Lampung yaitu hal pertama yang perlu diperhatikan adalah dengan mengkaji terlebih dahulu point utama dari efisiensi kegiatan itu sendiri, yaitu berkenaan dengan proses masukan (input) dibandingkan dengan hasil (output) dari suatu program/kegiatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat efisiensi/mutu dari hasil program/kegiatan yang dijalankan tersebut adalah dengan menghitung seberapa besar/kecilnya penghamburan anggaran kegiatan dengan produk/hasil kinerja program/kegiatan yang telah dijalankan dan ingin dicapai. Semakin dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal.

Sedangkan efektifitas yaitu berkenaan dengan rasio antara tujuan kegiatan atau dampak yang diinginkan (*outcomes*) dengan hasil kegiatan (*output*), artinya sejauh mana tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dihasilkan, baik itu dalam hal kuantitas maupun kualitas. Apabila program/kegiatan yang telah diselesaikan namun belum menunjukkan kualifikasi ideal yang diharapkan berarti ada masalah efektifitas dari program/kegiatan yang dijalankan tersebut. Adapun analisis efektifitas dan efisiensi terhadap realisasi kinerja dan realisasi anggaran dengan penggunaan sumber daya tahun 2024 kali ini, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi Gubernur Lampung dimana DPMDT sebagai salah satu OPD pendukungnya dibidang pemberdayaan masyarakat, dapat diketahui sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Tahun 2024

No	(IKU) Indikator Kinerja Utama	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
		Target	Realisasi	%	P-APBD 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase peningkatan jumlah desa menggunakan sistem smart village	85,76%	99,95%	116,55	13.991.331.963,00	13.464.691.511,00	96,24
2	Persentase Penurunan jumlah desa tertinggal	0,15%	0,16%	106,67	1.544.423.330,00	1.542.113.800,00	99,85
3	Persentase Peningkatan status desa mandiri	25,58%	30,90%	120,8	3.166.495.300,00	3.147.530.404,00	99,40
J U M L A H					18.702.250.593,00	18.154.335.715,00	97,07

Sumber: *Olahan Data DPMDT, Maret 2025*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta tingkat efektifitas dan efisiensi yang telah dilakukan oleh DPMDT Provinsi Lampung pada tahun 2024 sudah tercapai dan terserap atau digunakan dengan cukup baik. Efektivitas dan Efisiensi dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pada IKU “Persentase peningkatan jumlah desa menggunakan sistem smart village” capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi yaitu **116,55%** dengan capaian anggaran yang diperoleh yaitu **96,24%**, maka dapat dikatakan kinerja yang **efektif dan efisien**.
- b. Pada IKU “**Persentase Penurunan jumlah desa tertinggal**” dengan capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi yaitu **106,67%** dengan capaian anggaran yang diperoleh yaitu **99,85%**, maka dapat dikatakan **efektif dan efisien**.
- c. Pada IKU “**Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri**” dengan capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi yaitu **120,8%** dengan capaian anggaran yang

diperoleh yaitu **99,40%**, maka dapat dikatakan **efektif dan efisien**.

Dalam pencapaian sasaran strategis DPMDT di dukung oleh program kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian kinerja dan serapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.17

Tabel Efektivitas dan Efisiensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMDT Tahun 2024

No.	IKU	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024			Anggaran 2024		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	P-APBD 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Persentase peningkatan jumlah desa menggunakan sistem smart village	%	85,76	95,95	116,55	Rp13.991.331.963,05	13.464.691.511	96
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persen	100	99	99	12.427.808.863	11.995.695.411	96,52
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	99	99	150.000.000	149.808.200	99,87
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	dokumen	5	5	100	45.000.000	44.979.900	99,96
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	2	100	50.000.000	49.863.200	99,73
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4	4	100	55.000.000	54.965.100	99,94
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	99	99	8.475.455.314	8.110.122.410	95,69
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12	12	100	8.424.955.314,00	8.059.633.710	95,66
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	0	-	-	0	0	0,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dokumen	3	3	100	25.000.000	24.997.400	99,99
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 dokumen	12	12	100	25.500.000	25.491.300	99,97
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 laporan	100	99	99	70.000.000	69.985.400	99,98
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	1 laporan	1	1	100	25.959.000	25.957.200	99,99

	Barang Milik Daerah pada SKPD							
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1	2	200	44.041.000	44.028.200	99,97
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 orang	100	100		530.000.000	515.895.300	97,34
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14 orang	14	14	100	180.000.000	167.310.000	92,95
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	200	200	100	350.000.000	348.585.300	99,60
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22 paket	100	99		2.067.169.200	2.045.538.116	98,95
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22 paket	22	22	100	44.495.600	44.434.600	99,86
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42 paket	42	42	100	250.000.000	229.090.000	91,64
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50 paket	50	50	100	30.000.000	30.000.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20 paket	20	20	100	25.000.000	25.000.000	100,00
	Penyediaan Bahan / Material	36 laporan	36	36	100	34.908.200	34.907.600	100,00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	36 laporan	36	36	100	100.000.000	99.382.300	99,38
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 dokumen	5	5	100	1.226.890.400	1.226.850.816	100,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5 aplikasi	5	5	100	355.875.000	355.872.800	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100	99		680.684.349	654.361.485	96,13
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 persen	100	100	100	126.484.349	104.741.485	82,81
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	100	100	100	554.200.000	549.620.000	99,17
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 unit	100	99		454.500.000	449.984.500	99,01
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35 unit	35	35	100	250.000.000	245.574.500	98,23
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46 unit	46	46	100	24.500.000	24.410.000	99,63
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	1 Unit	1	1	100	180.000.000	180.000.000	100,00

	Kantor dan Bangunan Lainnya							
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		25	99		1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	3 Desa	3	3		1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	3 Desa	3	3	100	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		25	99		1.563.523.100	1.468.996.100	93,95
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 dokumen	25	99		1.563.523.100	1.468.996.100	93,95
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 dokumen	1	1	100	0	0	0,00
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	1	1	100	329.000.000	316.050.000	96,06
	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan	1 dokumen	1	1	100	474.243.100	473.443.100	99,83
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar	1 dokumen	1	1	100	319.640.000	240.284.000	75,17
	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten / Kota	1 dokumen	1	1	100	440.640.000	439.219.000	99,68
No.	IKU	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024			Anggaran 2024		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	P-APBD 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Persentase Peningkatan status desa mandiri	%	24,45	30,90	120,8	Rp3.166.495.300,00	3.147.530.404	99,40
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		25	99		1.860.845.300	1.857.708.404	99,84
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan		25	25	100	1.860.845.300	1.857.708.404	99,84

	Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama Berada di Lintas							
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	0	0	0	1	0	0	0,00
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	3 dokumen	3	3	100	289.975.500	289.413.000	99,81
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15 laporan	15	15	100	309.821.000	309.591.000	99,93
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	1	1	100	61.048.800	61.032.600	99,97
	Fasilitasi tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	4 Pokja	4	4	100	1.200.000.000	1.197.671.804	99,81
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		100	100	100	100.000.000	94.712.000	94,71
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	1	1	100	100.000.000	94.712.000	94,71
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	2 Kawasan Transmigrasi	1	1	100	100.000.000	94.712.000	94,71
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	%	100	100	100	80.650.000	70.514.000	87,43
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota	KK	100	100	100	80.650.000	70.514.000	87,43
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu)	KK	1	1	100	80.650.000	70.514.000	87,43
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	%	100	100	100	125.000.000	124.596.000	99,68
	Pengembangan Satuan Permukiman	35 Satuan Permukiman	100	99	99	125.000.000	124.596.000	99,68

	pada Tahap Pemantapan							
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	KK	4	4	100	125.000.000	124.596.000	99,68
No.	IKU	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024			Anggaran 2024		
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	P-APBD 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Persentase Penurunan jumlah desa tertinggal	%	0,16	100	612	1.544.423.330	1.542.113.800	99,85
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	%	25	25	%	1.544.423.330	1.542.113.800	99,85
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas					1.544.423.330	1.542.113.800	99,85
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	2 laporan	2	2	100	1.544.423.330	1.542.113.800	99,85
TOTAL			Rp.18.702.250.593,00			Rp.18.154.335.715,00		97,07

Sumber: *Olahan DPMDT, Maret 2025*

Berdasarkan tabel di atas diketahui:

- Dalam “Meningkatkan Desa Menggunakan Sistem Smart village” di dukung oleh 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Capaian Indikator Sasaran ini Efektif dalam berkinerja dan efisien dalam penggunaan anggaran.
- Dalam menurunkan status desa tertinggal dan meningkatkan status desa mandiri dengan indikator:
 - “persentase penurunan jumlah desa tertinggal” di dukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Capaian Indikator

Sasaran ini Efektif dalam berkinerja dan efisien dalam penggunaan anggaran.

3. “persentase peningkatan status desa mandiri” di dukung oleh 5 (lima) program, 5 (lima) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan. Capaian Indikator Sasaran ini Efektif dalam berkinerja dan efisien dalam penggunaan anggaran.

3.6 Refokusing Anggaran Tahun 2024

Refokusing Anggaran merupakan suatu upaya memprioritaskan penggunaan anggaran pada program tertentu terutama untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pencapaian sasaran strategis DPMDT Tahun 2024, yang tertera pada tabel berikut ini :

Table 3.18
Refokusing Anggaran (P-APBD) Tahun 2024

No	IKU (Indikator Kinerja Utama)	APBD (Rp.)	P – APBD (Rp.)	Refokusing (%)
1	Persentase peningkatan jumlah desa menggunakan sistem smart village	15.319.641.102,65	13.991.331.963,05	8,67
2	Persentase Penurunan jumlah desa tertinggal	170.560.000,00	1.544.423.330,00	805,50
3	Persentase Peningkatan status desa mandiri	2.842.316.900	3.166.495.300,00	11,41
Total		18.302.518.002,65	18.702.250.593,05	2,18

Sumber: *Olahan Data DPMDT, Maret 2025*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya tambahan 2,18% senilai Rp. 399.732.590,40,-. Penambahan ini difokuskan pada IKU Persentase Penurunan Jumlah Desa Tertinggal dan “Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri”.

Tabel 3.19
Refokusing Anggaran (P-APBD) Persub Kegiatan 2024

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu APBD	PAGU P-APBD	%
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pemerintah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi)	persen	12.427.808.863	11.995.695.411	97
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	persen	150.000.000	149.808.200	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	45.000.000	44.979.900	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Koordinasi dan Dokumen Pelaporan Ikhtisar Realisasi Kinerja	laporan	50.000.000	49.863.200	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan dan evaluasi Kinerja tepat waktu	4 laporan	55.000.000	54.965.100	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan		8.475.455.314	8.110.122.410	96
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	8.424.955.314,00	8.059.633.710	96
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	0	0	#DIV/0!
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 dokumen	25.000.000	24.997.400	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	25.500.000	25.491.300	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas administrasi barang milik daerah		70.000.000	69.985.400	100
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan	25.959.000	25.957.200	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan sensus	1 laporan	44.041.000	44.028.200	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas administrasi kepegawaian		530.000.000	515.895.300	97
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase terlaksananya diklat formal dan bintek PNS	4 orang	180.000.000	167.310.000	93
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang terlatih	400 orang	350.000.000	348.585.300	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas administrasi umum		2.067.169.200	2.045.538.116	99
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya penerangan bangunan kantor	22 paket	44.495.600	44.434.600	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tersedianya kelengkapan dan peralatan kantor	42 paket	250.000.000	229.090.000	92
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase tersedianya penerangan bangunan kantor	300 paket	30.000.000	30.000.000	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	15000 paket	25.000.000	25.000.000	100
	Penyediaan Bahan / Material	Prosentase tersedianya alat tulis kantor pakai habis	2020 paket	34.908.200	34.907.600	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pembiayaan makan dan minum	36 laporan	100.000.000	99.382.300	99
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 laporan	1.226.890.400	1.226.850.816	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan aplikasi elektronik	5 dokumen	355.875.000	355.872.800	100
						#DIV/0!

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu APBD	PAGU P-APBD	%
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan kapasitas jasa penunjang urusan pemda		680.684.349	654.361.485	96
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase tersedianya jasa komunikasi,sda dan listrik	100 persen	126.484.349	104.741.485	83
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya keamanan,kebersihan dan keindahan kantor	100 persen	554.200.000	549.620.000	99
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan kapasitas pemeliharaan barang milik daerah		454.500.000	449.984.500	99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	250.000.000	245.574.500	98
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpeliharanya peralatan dan gedung kantor	35 unit	24.500.000	24.410.000	100
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46 unit	180.000.000	180.000.000	100
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan		1.000.000.000	1.000.000.000	100
	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama antar desa yang dilaksanakan		1.000.000.000	1.000.000.000	100
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah peserta yang dilatih	75 orang	1.000.000.000	1.000.000.000	100
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan pelayanan administrasi menggunakan Smart Village		1.563.523.100	1.468.996.100	94
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang didampingi pelaksanaan administrasinya menggunakan smart village		1.563.523.100	1.468.996.100	94
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang didampingi pengelolaan keuangan desanya	1 dokumen	0	0	#DIV/0!
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	jumlah desa yang dievaluasi perkembangan desanya	1 dokumen	329.000.000	316.050.000	96
	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah perangkat desa yang dibina	1 dokumen	474.243.100	473.443.100	100
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDes yang dibina dan diawasi	1 dokumen	319.640.000	240.284.000	75
	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten / Kota	Jumlah desa yang terdata secara digital	1 dokumen	440.640.000	439.219.000	100

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Pagu APBD	PAGU P-APBD	%
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif		3.405.268.630	3.399.822.204	100
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Kelembagaan Masyarakat Desa, Sarana Prasarana Desa dan Usaha Ekonomi Desa serta Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		3.405.268.630	3.399.822.204	100
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah pokja adat yang terinventarisasi	1 dokumen	0	0	#DIV/0!
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peserta yang dilatih	3 lembaga	289.975.500	289.413.000	100
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah usaha ekonomi yang didampingi	3 dokumen	1.544.423.330	1.542.113.800	100
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa yang menerapkan teknologi tepat guna	2 laporan	309.821.000	309.591.000	100
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kab/kota yang berpartisipasi	15 laporan	61.048.800	61.032.600	100
	Fasilitasi tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK	1 laporan	1.200.000.000	1.197.671.804	100
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penyelesaian pemilikan lahan di 1 (satu) Kawasan Transmigrasi		100.000.000	94.712.000	95
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang diselesaikan masalah lahannya		100.000.000	94.712.000	95
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah kawasan transmigrasi yang diselesaikan masalah lahannya	1 Kawasan Transmigrasi	100.000.000	94.712.000	95
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase calon peserta transmigran yang difasilitasi untuk dibina di 2 (dua) kawasan transmigrasi		80.650.000	70.514.000	87
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran keluar lampung		80.650.000	70.514.000	87
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran keluar lampung	50 KK	80.650.000	70.514.000	87
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase identifikasi sarana dan prasarana di 1 (satu) kawasan transmigrasi		125.000.000	124.596.000	100
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan		125.000.000	124.596.000	100
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pematapan Satuan Permukiman	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan	35 Satuan Permukiman	125.000.000	124.596.000	100

Selama tahun 2024 pelaksanaan program/kegiatan yang dijalankan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas PMDT Provinsi Lampung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total Nilai Pagu adalah sebesar Rp.18.302.518.002,65,- dan telah terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) dengan total Nilai Pagu sebesar Rp.18.702.250.593,- dengan tambahan sebesar (2,18%).

3.7 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (TL LHE SAKIP) Tahun 2024

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas PMDT Provinsi Lampung, No. 700/11/IV.01/10/2024 tanggal 27 Mei 2024, dan juga berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Lampung No. 700/78/ST/IV.01/10/2024, maka untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PMDT Provinsi Lampung TA. 2024 dilaksanakan mulai tanggal 29 April sampai dengan 03 Mei 2024. Dari hasil Evaluasi Implementasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 tersebut, maka Dinas PMDT Provinsi Lampung telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi LHE Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.20
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2024 tahun Sebelumnya

No.	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja					Selesai
	Agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung merubah dokumen Tekhnis Perencanaan Kinerja Tugas Dan Fungsi Pada Renstra Perubahan sesuai peraturan yang baru yaitu Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung menyesuaikan dokumen Tekhnis Perencanaan Kinerja Tugas Dan Fungsi Pada Renstra 2025-2026	1 Dokumen Pernyataan	Desember 2024	KEPALA DINAS	https://drive.google.com/file/d/1gWsuwqBi55n4l74xlp-TBMoN8N9edreY/view?usp=sharing
2	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja					Selesai
	Agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung merumuskan dan menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang Pengukuran Kinerja melakukan evaluasi SOP setiap 2 tahun sekali guna perbaikan terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung akan merumuskan dan menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang Pengukuran Kinerja.	SOP Pengumpulan data dan Pengukuran Kinerja	Agustus 2024	KEPALA DINAS	https://drive.google.com/file/d/1O0m5XqzDrhmt0wkpaOEaQp5aD-i_Hgp/view?usp=drive_link
						https://drive.google.com/file/d/1NCb6Or4bRF07LyiVBpctgzmb7bm5maZ/view?usp=drive_link
	Agar setiap pegawai dapat sepenuhnya melaksanakan dan mematuhi keputusan yang telah diterbitkan/ dikeluarkan oleh pimpinan selaku pengambil keputusan (Decision Maker).	Kepala Dinas telah menerbitkan surat edaran untuk di laksanakan dan patuhi seluruh Pegawai	Surat Edaran	Agustus 2024	KEPALA DINAS	https://drive.google.com/file/d/1rCoF0vhFIKbUk2YICjrliUqveeAKSYkB/view?usp=drive_link
	Agar Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja (SKP) yang berkomitmen	Setiap pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sudah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja (SKP) yang berkomitmen dalam mencapai kinerja Dinas yang telah di rencanakan.	Sasaran Kinerja Pegawai 2023	Juli 2024	Pegawai Dinas PMDT	https://drive.google.com/file/d/1m3zpm5sqUvpF7HQ08x9SYIR9OCrRtRjP/view?usp=sharing
3	dalam mencapai kinerja Dinas yang telah di					Selesai
	Agar setiap pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dapat memahami dan peduli atas pelaporan kinerja.	Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung memahami dan peduli atas pelaporan kinerja hasil (kinerja bulanan pegawai	kinerja bulanan pegawai	Agustus 2024	Pegawai Dinas PMDT	https://drive.google.com/file/d/1c6HSxGRc9ZJyP-8thoFB0iJTLIfyN-cl/view?usp=drive_link
	Agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam membuat dan menyusun Dokumen Laporan Kinerja yang dapat menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung telah memasukan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja) pada Dok. Evaluasi Renja per triwulan	Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2023	Desember 2024	KEPALA DINAS	https://drive.google.com/file/d/1WEgyP6L-tatUW9wMcuGlpzyz9q-1d7h/view?usp=sharing
	Agar setiap pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung peduli dan dapat menyampaikan penyajian informasi dalam laporan kinerja.	Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sudah menyampaikan penyajian informasi dalam laporan kinerja	Laporan Kinerja Pegawai (SKP) Tahunan Januari 2024	Januari 2024	Pegawai Dinas PMDT	https://drive.google.com/file/d/1dt0ztMXK-U729pZAzgoUkd-o-w42t1cD/view?usp=drive_link
4	Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.					Selesai
	Agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sudah melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Self Assesment (Aplikasi e-vasakip)	Juli 2024	KEPALA DINAS	https://drive.google.com/file/d/13yG-sisdI1qkZWVzI7y5vLcj59YGiaf/view?usp=sharing
	Agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dapat merumuskan dan membentuk Tim Evaluasi AKIP Internal dengan SDM yang memadai.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung sudah merumuskan dan membentuk Tim Evaluasi AKIP Internal dengan SDM yang memadai.	SK TIM SAKIP	Juli 2024	KEPALA DINAS	https://drive.google.com/file/d/1H0YegNmJE9b91BOZ2U1Z5uCGI-QbKQ4xj/view?usp=drive_link
	Agar dimanfaatkan Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Dinas PMDT telah memanfaatkan Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja berupa Perjanjian Kinerja (PK) 2024	PK 2024	Februari 2024	KEPALA DINAS	https://drive.google.com/file/d/1m8yMaFQK6QM33s3M0EnAVKOCKI5RGz/view?usp=drive_link

Bandar Lampung, 18 Juli 2024

An. Kepala Dinas

Sekretaris,



I Wayan Gunawan, S.E.

Pembina Tk. I

NIP.19710102 199110 1 001

3.8 Prestasi dan Inovasi Dinas PMDT Tahun 2024

A. Prestasi Dinas PMDT

1. Dinas PMDT Provinsi Lampung meraih juara 1 apresiasi rumah data kependudukan kategori digital yaitu desa pulung kencana, penghargaan tersebut di peroleh dari BKKBN.



2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia memberikan Piagam Penghargaan kepada BUMDesa Mitra Mandiri Sejahtera Rejomulyo atas keberhasilan kerja sama dan sebagai penyalur Pupuk dengan Pupuk Indonesia .



3. Penghargaan Inovasi Pelayanan BUM Desa Melalui Elektronik Samsat Desa

PRESTASI JANJI KERJA KE-30
Pendampingan Program Pembangunan Desa.




Penghargaan khusus dari Kemendes dan PDTT untuk kepala daerah yakni Abdi Ekonomi Desa. Sebagai apresiasi dukungan, kebijakan dan program serta pendampingan dan pembinaan kepada BUMDes demi kebangkitan ekonomi desa.



B. Inovasi Dinas PMDT 2024

Inovasi IKU 1 “Persentase Peningkatan jumlah desa menggunakan sistem Smart Village”, dengan inovasi sebagai berikut :

No	Inovasi	Uraian	Manfaat	Dampak
1.	e-Voting	salah satu aplikasi dari program Smart Village yang digunakan untuk pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa secara digital dengan memanfaatkan KTP elektronik	Mempercepat proses Pilkades	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pilkades
2.	e-Samdes	Aplikasi berbasis android yang digunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan secara elektronik melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).	Meningkatkan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Mengoptimalkan	meningkatnya pendapatan daerah dan kepuasan masyarakat.

			penerimaan di sektor pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli desa, Efisien waktu, tenaga dan biaya bagi masyarakat yang jauh dari kantor Samsat.	
3.	Desa Anti Korupsi	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengukuhkan Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, sebagai Desa Antikorupsi	Efektivitas dan Efisiensi penggunaan dana desa	Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa
4.	Desa Baznas	Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meluncurkan Program Desa BAZNAS Sektor Peternakan. Desa Madukoro Kabupaten Lampung Utara dan Kampung Menggala Kecamatan Tulang Bawang menjadi percontohan desa Baznas sektor peternakan, dimana tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, selain memberikan bantuan Ternak Kambing, juga disediakan kandang agar kelompok yang mendapatkan bantuan bisa secara maksimal memanfaatkan bantuan tersebut.	Memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Masyarakat Miskin	Mengurangi Angka Kemiskinan di Desa
5.	Warung Sehat	Kerjasama Bumdes sebagai mitra binaan PT. Kimia Farma Apotek. Hal tersebut merupakan inovasi terbaru dan pertama di Indonesia dalam rangka penurunan angka stunting, pemberian layanan kesehatan kepada	Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan obat yang berkualitas	Peningkatan derajat hidup masyarakat di desa

		masyarakat dan penyediaan produk kesehatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan obat, vitamin, perlengkapan bayi dan lain-lainnya yang tinggal di desa-desa.		
--	--	---	--	--

Sumber: Diolah Dinas PMDT Provinsi Lampung, Maret 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi (DPMDT) Provinsi Lampung dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai berupa kinerja kegiatan, kinerja sasaran dan laporan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

DPMDT Provinsi Lampung menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 sasaran dengan 3 IKU Tahun 2024 yaitu, IKU 1 “Persentase Peningkatan Jumlah Desa Menggunakan Sistem Smart Village” capaiannya sebesar 116,55% dari target 85,76% dan realisasi 99,95% dengan kategori **Sangat Memuaskan**. Sedangkan pada IKU 2 “Persentase Penurunan Jumlah Desa Tertinggal” capaian sebesar 106,67% dari target 0,15% dan realisasi 0,16% dengan kategori **Sangat Memuaskan**. Selanjutnya pada IKU 3 “persentase peningkatan status desa mandiri” capaiannya sebesar 120,8% dari target 25,58% realisasi 30,90% dengan kategori **Sangat Memuaskan**.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan DPMDT Tahun 2024 telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.18.302.518.002,65 dan telah terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) sebesar Rp.18.702.250.593,05 serta realisasi anggaran sebesar Rp.**18.154.335.715,00** atau capaiannya **97,07%**. Dimana terdiri dari IKU 1 “Persentase peningkatan jumlah desa menggunakan sistem smart village” dengan pagu P-APBD Rp.13.991.331.963,00 dan realisasi anggaran Rp.13.464.691.511,00 atau capaiannya **96,42%**. Sedangkan IKU “Persentase Penurunan Jumlah Desa Tertinggal” dengan P-APBD Rp. 1.544.423.330,00 dan realisasi anggaran Rp.1.542.113.800,00 atau capaiannya **99,85%**. Selanjutnya pada IKU 3 “persentase peningkatan status desa mandiri” dengan pagu P-APBD Rp.3.166.495.300,00 dan realisasi anggaran Rp.3.147.530.404,00 atau capaiannya **99,40%**.

Pada Tahun 2024 DPMDT juga telah mengalami Refokusing Anggaran yang difokuskan pada IKU “Persentase Penurunan Jumlah Desa Tertinggal” dan “Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri” yaitu tambahan sebesar 2,18% atau senilai Rp.399.732.590,40,-.

Realisasi kinerja dari setiap program/kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dengan memanfaatkan anggaran perubahan APBD DPMDT yang mencakup 3 (tiga) IKU 1, yaitu pada IKU “Persentase peningkatan jumlah desa menggunakan sistem smart village” capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi (116,55%) dibandingkan capaian anggaran yang diperoleh (96,24%), sehingga dapat dikatakan kinerjanya **efektif dan efisien**. Sedangkan pada IKU 2 “Persentase Penurunan jumlah desa tertinggal” capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi (106,67%) dibandingkan capaian anggaran yang diperoleh (99,85%) maka dapat dikatakan kinerja yang **efektif dan efisien**. Selanjutnya pada IKU 3 “Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri” capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi (120,8%) dibandingkan capaian anggaran yang diperoleh (99,40%) maka dapat dikatakan kinerja yang **efektif dan efisien**.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas PMDT Provinsi Lampung sepanjang Tahun 2024 merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pelatihan guna peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa mengenai penggunaan sistem smart village, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Melaksanakan Kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dengan melibatkan perguruan tinggi, LSM, dan penyedia teknologi lokal untuk pengembangan sistem smart village;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk pengentasan desa tertinggal dengan mengarahkan penggunaan dana desa ke program yang berdampak langsung terhadap indikator kemajuan IDM, seperti sanitasi, air bersih, PAUD, dan BUMDes, dana desa;
4. Meningkatkan kinerja lembaga kemasyarakatan desa agar aktif dalam proses perencanaan dan Pembangunan desa;
5. Mendorong pembangunan desa menuju desa mandiri, melalui pengembangan, pelatihan, pendampingan ekonomi desa (BUMDesa) dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG);
6. Melaksanakan upaya pengembangan kawasan perdesaan dengan memetakan desa-desa kategori maju yang memiliki skor IDM mendekati persentase desa mandiri; dan

7. Meningkatkan SDM kepala desa, perangkat desa, dan lembaga desa tentang tata Kelola, keuangan, manajemen Pembangunan desa, dan transformasi digital.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas PMDT kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah ikut ambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam membangun Provinsi Lampung.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas PMDT Provinsi Lampung Tahun 2024 ini, dapat menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang menjadi semakin baik lagi, serta juga dapat memberi manfaat serta barokah untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.



Bandar Lampung, Agustus 2025
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
Provinsi Lampung

SAIPUL, S.Sos, M.IP
Pembina Utama Madya
NIP.19710726 199902 1 001